

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang dilakukan oleh setiap negara dalam meningkatkan taraf hidup sekaligus menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara membawa pengaruh positif maupun negatif. Kuncoro (2010), suatu negara dapat dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonominya apabila telah mampu mengatasi tiga masalah yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi. Adapun ketiga permasalahan tersebut yakni; (1) meningkatnya jumlah penduduk miskin; (2) distribusi pendapatan yang semakin timpang dan (3) lapangan pekerjaan yang minim variatif hingga tidak mampu menyerap besarnya jumlah pencari kerja (Wulandari, 2016).

Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pencapaian tingginya angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi keberhasilan negara dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu hambatan dalam pembangunan ekonomi di seluruh negara, baik maju maupun negara berkembang. Kemiskinan menunjukkan suatu kondisi ketidakmampuan individu maupun kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum guna mencapai hidup layak. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi baik secara absolut maupun relatif yang

menyebabkan individu atau kelompok masyarakat yang ada pada suatu wilayah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural maupun structural (Wulandari, 2018).

Kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif merupakan konsep kemiskinan yang mengacu pada standar kelayakan hidup dari individu atau kelompok masyarakat. Kemiskinan absolut atau multak didasarkan pada standar hidup minimum suatu masyarakat yang digambarkan pada kondisi di bawah garis kemiskinan atau poverty line, sedangkan kemiskinan relatif didasarkan pada kondisi yang sangat dekat dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi pada kelompok masyarakat.

Tingginya angka kemiskinan yang terjadi pada suatu wilayah mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang hidup dengan berbagai kesulitan baik memenuhi kebutuhan konsumsi, keterbatasan modal bahkan memiliki keterbatasan dalam mengakses pelayanan publik seperti pendidikan maupun kesehatan. Kemiskinan yang semakin meningkat tanpa adanya upaya pengetasan akan menimbulkan dampak negatif mulai dari menghambat kegiatan pembangunan ekonomi hingga menimbulkan permasalahan sosial dengan ditandainya meningkatnya tindak kriminalitas di

masyarakat. Kemiskinan sendiri adalah masalah yang kompleks dan multidimensional sehingga diperlukan upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M Nasir, dkk, dalam Adit Agus Prasetyo, 2010).

Menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Indonesia merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi yang sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Salah satu indikator berhasilnya suatu negara menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dapat dilihat melalui menurunnya tingkat kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Indonesia masih menjadi negara yang terbelenggu dengan permasalahan kemiskinan. Berdasarkan laporan dari Asean-China-UNDP *Report on Financing the Sustainable Development Goals (SDG'S) in ASEAN* pada tahun 2017 menunjukkan bahwa dari sekitar tiga puluh enam juta penduduk di Asia Tenggara yang hidup di bawah garis kemiskinan, sebanyak sembilan puluh persennya berada di negara Filipina dan Indonesia. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan dengan menggunakan data masyarakat yang berpendapatan rendah atau sekitar US\$ 1,90 atau setara dengan dua puluh lima ribu rupiah sesuai dengan ketetapan World Bank dalam menetapkan kemiskinan.

Indonesia memiliki wilayah administratif yang terdiri dari 33 provinsi yang tentunya memiliki penyebaran jumlah penduduk miskin yang berbeda – beda. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah untuk mengoptimalkan proses pembangunan ekonomi di setiap daerah. Melalui otonomi daerah juga diharapkan dapat mengurai permasalahan kemiskinan yang tinggi di setiap daerah. Pulau Jawa selain menjadi penopang dan penggerak perekonomian di Indonesia juga tidak dapat terhindar dari masalah kemiskinan.

Tabel 1.1 menunjukkan jika populasi penduduk miskin di Pulau Jawa sepanjang tiga tahun terakhir, Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dibandingkan ke lima provinsi lainnya, sedangkan DIY Yogyakarta menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terendah di Pulau Jawa sepanjang tahun 2010-2021. Selama dua belas tahun terakhir perkembangan jumlah penduduk miskin di enam provinsi Pulau Jawa cenderung turun yang kemudian sempat naik dan turun kembali, sedangkan jika dilihat dari lima provinsi yang ada di pulau Jawa provinsi Jawa Timur sempat mengalami lonjakan kemiskinan di tahun 2015 sebesar 4775.97 ribu jiwa dan turun kembali di tahun berikutnya yang mengalami kenaikan kembali di tahun 2020 menjadi 4585.97 ribu jiwa.

Berikut ini merupakan populasi penduduk miskin di enam provinsi yang ada di Pulau Jawa selama delapan tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) di Pulau Jawa Periode 2010-2021

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2010	312.20	4773.70	5369.20	577.30	5529.30	758.20
2011	363.42	4648.63	5107.36	560.88	5356.21	690.49
2012	366.80	4477.50	4977.40	562.10	5071.00	652.80
2013	375.70	4382.65	4704.87	535.18	4865.82	682.71
2014	412.79	4238.96	4561.82	532.59	4748.42	649.19
2015	368.67	4485.65	4505.78	485.56	4775.97	690.67
2016	385.84	4168.11	4493.75	488.83	4638.53	668.74
2017	393.13	3774.41	4197.49	466.33	4405.27	699.83
2018	372.26	3539.40	3867.42	450.25	4292.15	657.74
2019	362.30	3375.89	3679.40	440.89	4056.00	641.42
2020	496.84	4188.52	4119.93	503.14	4585.97	857.64
2021	498.29	4004.86	3934.01	474.49	4259.60	852.28

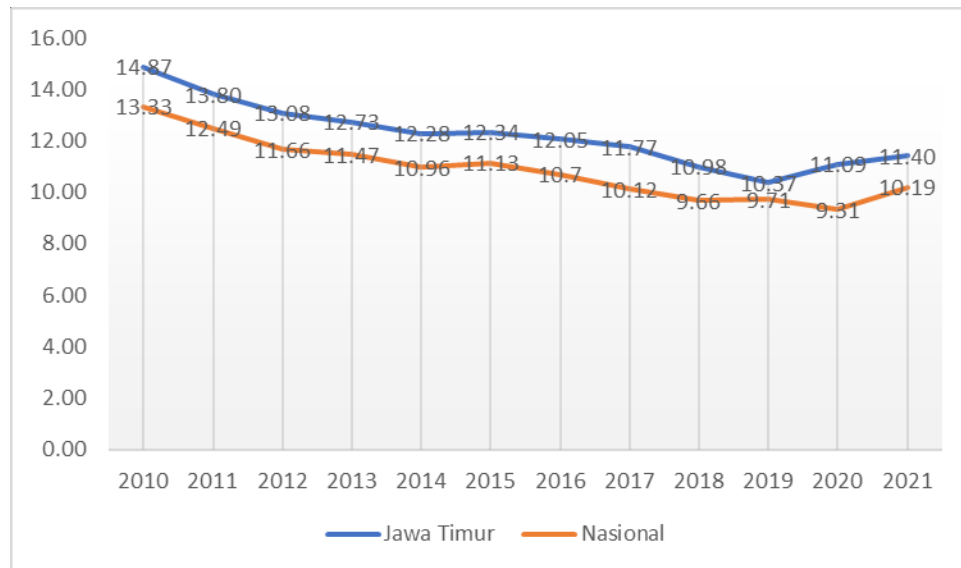
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Penurunan tren jumlah penduduk miskin tentunya tidak terlepas dari program- program anti kemiskinan yang dihadirkan oleh pemerintah mulai dari program bantuan langsung tunai, program keluarga harapan maupun jenis bantuan social lainnya. A. Redjalman menjelaskan, situasi upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan masih belum cukup, karena saat ini penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi

masih sangat rentan. Bahkan di kenyataan masih terjadi pergeseran kelompok miskin menjadi hampir miskin dan rentan miskin.

Jawa Timur adalah provinsi terluas dari enam provinsi di Pulau Jawa dengan luas wilayah daratan sebesar sebesar 48.258 km². Tentunya dengan memiliki luas wilayah daratan sebesar itu, Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dengan 9 kota. Sampai dengan tahun 2021 menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur memiliki populasi penduduk sebesar 40.878.789 ribu jiwa. Pengentasan masalah terus menjadi fokus dari pada pemerintah Jawa Timur yang dimasukan pada perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

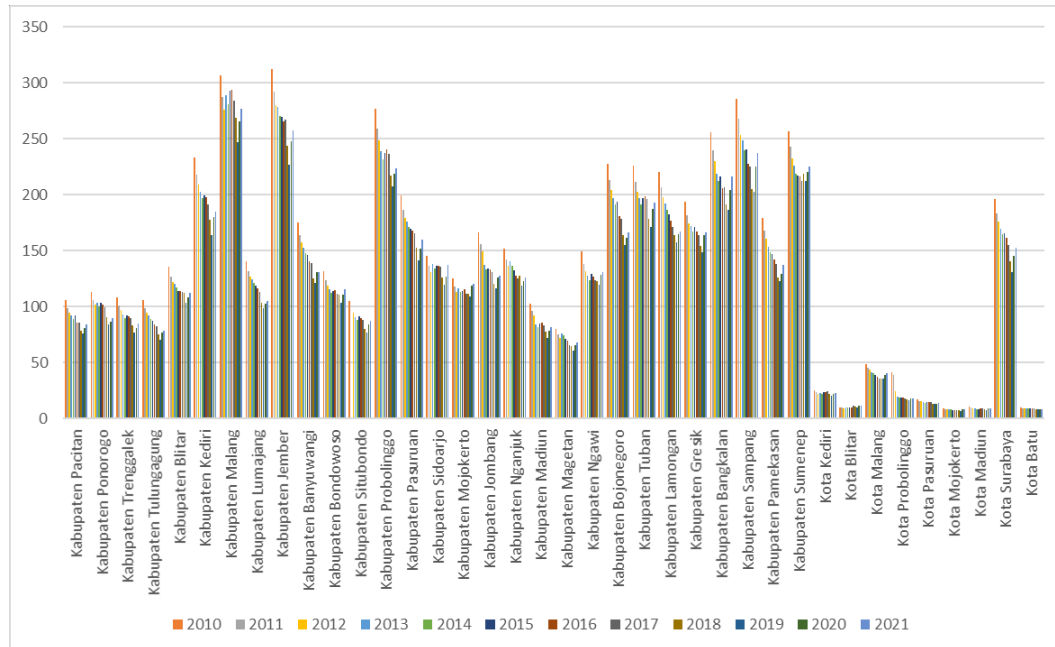
Kemiskinan yang semakin meningkat pada akhirnya tidak hanya memicu permasalahan social akan tetapi akan menghambat jalannya proses pembangunan ekonomi yang sedang dilakukan oleh setiap negara. Biaya pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh pemerintah tentunya menjadi lebih besar karena semakin banyaknya masyarakat yang hidup dalam perangkap kemiskinan.



Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur dan Nasional Tahun 2010-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.1 jika sepanjang delapan tahun terakhir persentase penduduk miskin di Jawa Timur masih lebih tinggi dari pada jumlah penduduk miskin pada tingkat nasional. Kondisi ini tentunya akan dapat menghambat proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur. Dengan memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa tentunya mengharuskan roda perkonomian Jawa Timur memacu pembangunan ekonomi yang cepat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahkan mengurangi jumlah penduduk miskin yang tinggi.



Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/kota (Ribuan Jiwa) di Jawa Timur dan Nasional Tahun 2010-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.2 menunjukkan kondisi di mana tingkat kemiskinan yang dibuktikan dalam persentase terdapat beberapa kabupaten di Jawa Timur yang masih berada pada tingkat kemiskinan yang tinggi sepanjang periode tahun 2010 hingga 2021 antara lain; Kabupaten Probolinggo; Kabupaten Bangkalan; Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep.

Kemiskinan yang terjadi pada suatu wilayah tentunya tidak dapat terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu dari faktor penyebab kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan jumlah output per kapita yang dihasilkan

secara agregat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (necessery condition) bagi pengurangan tingkat kemiskinan (Hapsoro, 2013).

Indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah kerap dicerminkan melalui pencapaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB diartikan sebagai keseluruhan nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi pada suatu daerah di dalam satu periode tertentu. Pencapaian PDRB yang semakin tinggi akan berimplikasi pada meningkatnya penerimaan suatu daerah, dan sebaliknya jika PDRB rendah berpotensi penerimaan daerah juga akan semakin kecil. Pencapaian PDRB juga dapat dilihat melalui dua cara yakni berdasarkan atas harga berlaku dan atas harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur secara umum digerakan dan ditopang oleh tiga sektor utama yakni sektor pertanian, industri pengolahan hingga sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut berkontribusi besar terhadap komposisi pembentuk PDRB berdasarkan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data BPS hingga akhir tahun 2017 kontribusi ketiga sektor terhadap PDRB Jawa Timur yakni pertanian sebesar 12,80 persen, industri pengolahan sebesar 29,03 persen dan sektor perdagangan sebesar 18,18 persen (Badan Pust Statistik Indonesia, 2023).

PDRB atas harga konstan merupakan nilai tersebut diperoleh dari nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tabel 1.2 berikut memberikan informasi terkait dengan pencapaian Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Timur sepanjang tahun 2010 hingga 2021.

Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Periode 2010 – 2021

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (miliar rupiah)
2010	990.648
2011	1.054.401
2012	1.124.464
2013	1.192.789
2014	1.262.684
2015	1.331.394
2016	1.405.236
2017	1.621.129
2018	1.542.755
2019	1.673.981
2020	1.616.909
2021	2.455.655

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

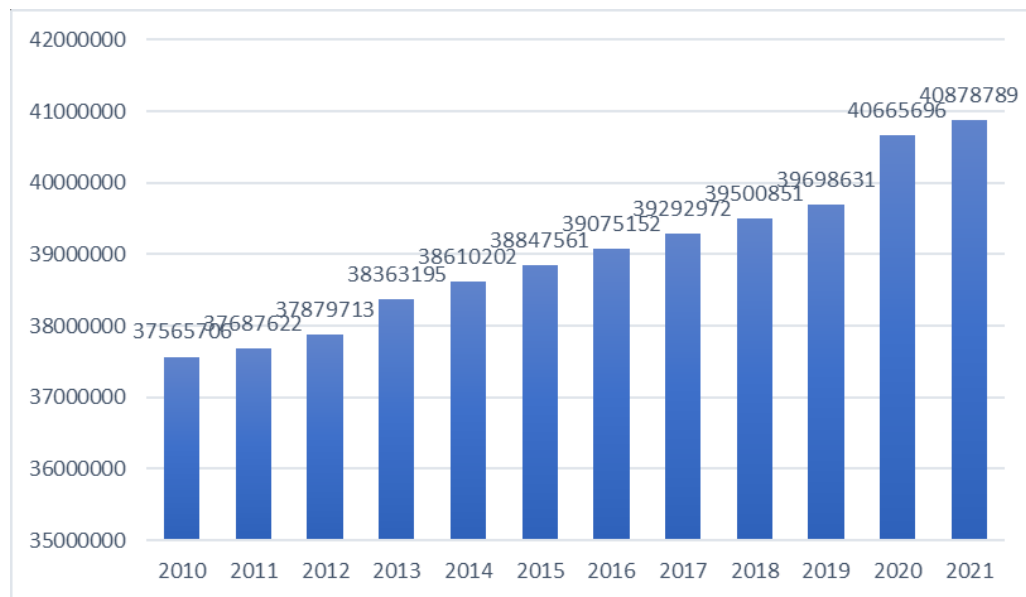
Tabel 1.2 memberikan informasi bahwa tingkat pencapaian produk domestik regional bruto Jawa Timur terus meningkat. Peningkatan PDRB mengindikasikan terjadi peningkatan produktivitas perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa. PDRB yang terus meningkat diharapkan mampu membiayai pembangunan yang membutuhkan biaya yang besar ketika

memiliki beban kemiskinan yang tidak sedikit. Memiliki tingkat pencapaian PDRB yang setiap tahunnya meningkat, tak sejalan dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Jawa bahkan persentase kemiskinan di Jawa Timur masih di atas persentase kemiskinan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas akan menghasilkan perluasan lapangan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian Bintang (2018) yang mencoba menganalisis pengaruh dari PDRB, pendidikan, kesehatan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan memiliki tingkat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak selalu berhasil dalam mengurangi kemiskinan. Namun, hasil penelitian Silastri (2017) mengungkapkan jika PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi dan bahkan dapat menjadi masalah mendasar yang dapat menghambat mewujudkan tujuan pembangunan. Whisnu (2011) tidak terkendalinya laju pertumbuhan penduduk akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan rakyat dapat menekan angka kemiskinan. Populasi penduduk memiliki peluang sebagai faktor pendorong dan bahkan penghambat

jalannya pembangunan. Sukirno dalam Rahmawati (2013) jumlah penduduk yang terus meningkat akan menjadi faktor pendorong karena meningkatkan jumlah tenaga kerja dan terjadi perluasan pasar barang dan jasa yang ditentukan oleh pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk, namun akan menjadi penghambat akibat jumlah penduduk yang banyak akan menurunkan produktivitas hingga menimbulkan pengangguran. Jumlah penduduk yang terus bertambah besar akan memperparah kemiskinan.



Gambar 1.3 Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) di Jawa Timur Tahun 2010-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pada periode 2010 – 2021 jumlah penduduk di Jawa Timur terus meningkat dari 37.565.706 juta jiwa menjadi 40.878.789 juta jiwa. Tentunya di dalam menekan angka pertumbuhan penduduk membutuhkan upaya

preferatif yang tepat selain program Keluarga Bencana (KB) yang cukup efektif di dalam menekan angka pertumbuhan penduduk di masa orde baru. Kenyataannya, di beberapa negara yang dengan populasi penduduk yang besar mempunyai jumlah penduduk miskin yang lebih banyak dibandingkan dengan negara yang memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit.

Para ahli dan teori meyakini adanya hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan penduduk. Pada teori Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, maka sumber daya akan habis di masa yang akan datang, sehingga menimbulkan bawah penyakit, kelaparan, dan berbagai macam penderitaan bagi manusia (Sitepu dan Sinaga, 2009). Untuk itu permasalahan kemiskinan membutuhkan perhatian yang sangat serius.

Pada penelitian Didu dan Fauzi (2016) penelitian terdahulu yang mencoba menguji pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten Singingi menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan penelitian Agustina dkk (2018) menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi pada suatu wilayah yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja akan menimbulkan tidak

terserapnya tenaga kerja yang artinya angka pengangguran menjadi tinggi. Pengangguran muncul sebagai akibat tidak seimbangnya antara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja. Ketika seorang individu atau kelompok masyarakat tidak terserap dalam pasar kerja maka akan menyebabkan produktivitas rendah, tidak memiliki pendapatan yang pada akhirnya menurunkan tingkat daya beli terhadap barang dan jasa. Dengan begitu angka kemiskinan akan terus meningkat. Untuk itu pengangguran masuk pada faktor yang dapat mendorong kemiskinan. Sadono dalam Wulandari (2018) semakin turunya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan.

Ketika seorang individu atau kelompok masyarakat tidak bekerja dan menganggur tentunya akan berdampak pada tingkat pendapatan yang dimiliki. Pendapatan yang semakin rendah akan mempengaruhi tingkat konsumsi terhadap kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan hingga menurunkan jangkauan untuk mengakses pelayanan Kesehatan. Kemiskinan sangat dekat kaitannya dengan pengangguran, karena semakin banyak pengangguran maka akan menurunkan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat.

Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Jawa Timur Periode 2010 – 2021

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2010	4.25
2011	5.33
2012	4.09
2013	4.3
2014	4.19
2015	4.47
2016	4.21
2017	4
2018	3.99
2019	3.82
2020	5.84
2021	5.74

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 1.3 di atas ini menggambarkan bahwa persentase tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur setiap tahun cenderung mengalami kondisi yang naik turun. Terlihat dari data di atas bahwa sempat terjadi peningkatan persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar satu persen di tahun 2011 kemudian turun kembali hingga di mengalami kenaikan di tahun 2013 dan 2015 terjadi peningkatan kembali sampai akhir tahun 2021. Menurut definisi Badan Pusat Statistik tingkat pengangguran terbuka atau TPT yakni prosentase penduduk yang masuk dalam angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan atau bahkan sedang mencari pekerjaan. Lincoln

Arsyad dalam Yudha (2013) ada hubungan atau keterkaitan yang erat antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, distribusi pendapatan yang tidak merata. Sebagian besar orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau sekedar pekerja part time akan selalu berada di antara kelompok masyarakat yang sangat miskin.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Nor Zuhdiyanty (2017) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia selama lima tahun terakhir dengan menggunakan studi kasus pada 33 Provinsi, mendapati hasil bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2015) yang memperoleh hasil bawa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Di sisi lain terdapat kondisi yang cukup menarik jika dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur yang setiap tahunnya meningkat di 10 tahun terakhir berdasarkan informasi Tabel 1.2 di atas namun berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat dengan terus meningkatnya jumlah penduduk miskin di setiap tahunnya. Di dalam penelitian ini menggunakan data panel dengan mencoba melihat bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Timur di rentang waktu 11 tahun terakhir.

Fenomena tersebut menjadi alasan masih diperlukan adanya penelitian lanjutan untuk menganalisis determinan terhadap kemiskinan dengan menggunakan perkembangan periode yang lebih terbaru. Untuk itu penulis mengambil penelitian dengan judul “Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2010-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian serta latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah tingkat pengangguran terbuka (TPT) mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau bahkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kemiskinan.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi, kajian dan informasi yang lebih lanjut bagi penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan bidang kemiskinan.